



Seminar Nasional LPPM UNSOED 2025

"Pengembangan Sumberdaya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan"

8 Oktober 2025

Purwokerto

ANALISIS HUBUNGAN SERAPAN ANGGARAN DENGAN SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN DI UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN (STUDI KASUS IMPLEMENTASI PERATURAN REKTOR NO 35 TAHUN 2018)

Anton Timur Wastoni^{1*}, Irma Indriyani², Rochmad Kasir Nugroho¹, Leny Sulanjari², Tunggul Priatmojo³

¹ Satuan Pengawasan Internal, Universitas Jenderal Soedirman

² Biro Keuangan dan Umum, Universitas Jenderal Soedirman

³ Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jenderal Soedirman

*Corresponding Author: anton.timur@unsoed.ac.id

ABSTRAK

Konsekuensi dari ditetapkannya Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) sebagai satuan kerja yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (PKBLU) adalah harus memiliki sistem akuntansi. Unsoed telah menetapkan Peraturan Rektor Nomor 35 Tahun 2018 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan, Tujuannya agar pengelolaan keuangan dilakukan secara efisien efektif, transparan, akuntabel, tertib administrasi, dan modern. Panjangnya tahapan dalam proses pertanggungjawaban keuangan di Unsoed, tentu akan berpengaruh pada kecepatan serapan anggaran dan kecepatan layanan. Untuk itu perlu dilakukan kajian untuk mengetahui berapa besar pengaruh tiap-tiap tahapan dalam proses pertanggungjawaban keuangan di Unsoed terhadap kecepatan serapan anggaran dan layanan. Penelitian ini dilakukan di Universitas Jenderal Soedirman dengan mengambil data transaksi keuangan tahun 2023 – 2024, Pengujian hipotesis dilakukan pendekatan Structural Equation Model (SEM) menggunakan Smart PLS. Hasil Penelitian menunjukkan Staf Penguji Tagihan (Staf PT) dan Otorasator Kegiatan dan Anggaran (OKA) memiliki pengaruh yang dominan terhadap kecepatan serapan anggaran dan layanan keuangan. Namun ada faktor lain yang tidak terdefinisi dan memiliki pengaruh sebesar 44,3% terhadap serapan anggaran dan layanan keuangan. Lama waktu layanan keuangan rata-rata 196,09 jam atau 8,17 hari.

Kata kunci: BLU, layanan, SEM, sistem akuntansi

ABSTRACT

The consequence of the establishment of Jenderal Soedirman University (Unsoed) as a work unit that implements the Public Service Agency (PKBLU) financial management pattern is that it must have an accounting system. Unsoed has established Rector Regulation Number 35 of 2018 concerning the Accounting and Reporting System, the aim is for financial management to be carried out efficiently, effectively, transparently, accountably, administratively, and modernly. The lengthy stages in the financial accountability process at Unsoed will certainly affect the speed of budget absorption and the speed of service. For this



Seminar Nasional LPPM UNSOED 2025

"Pengembangan Sumberdaya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan"
8 Oktober 2025
Purwokerto

reason, a study is needed to determine how much influence each stage in the financial accountability process at Unsoed has on the speed of budget absorption and service. This study was conducted at Jenderal Soedirman University by taking financial transaction data for 2023-2024. Hypothesis testing was carried out using the Structural Equation Model (SEM) approach using Smart PLS. The results of the study show that Billing Examiner Staff (PT Staff) and Activity and Budget Authorization (OKA) have a dominant influence on the speed of budget absorption and financial services. However, there are other undefined factors that have an influence of 44.3% on budget absorption and financial services. The average duration of financial services is 196.09 hours or 8.17 days

Keywords: BLU, services, SEM, accounting system,

PENDAHULUAN

Anggaran memiliki fungsi sebagai alat perencanaan dan pengendalian. Anggaran digunakan sebagai alat untuk menetapkan tujuan pemerintah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat (*public welfare*) dengan memanfaatkan sumber daya dan dana untuk mendukung kegiatan pembangunan jangka panjang dalam bentuk anggaran tahunan (Bastian, 2010). Anggaran dalam akuntansi pemerintahan merupakan dasar pelaksanaan suatu kegiatan yang dapat dibiayai oleh keuangan negara atau daerah (Arif, Muchlis, & Iskandar, 2009). Aspek penting dalam penggunaan anggaran pemerintah adalah transparansi, efisiensi dan partisipasi masyarakat.

Kegiatan pelaksanaan anggaran meliputi pemenuhan, penyampaian dan pemeriksaan dokumen tagihan pembayaran dengan memperhatikan kesesuaian akun belanja yang digunakan, pagu yang dimiliki dan standar lain sesuai aturan yang ditetapkan. Daya serap anggaran berkorelasi positif dengan keakurasian dalam perencanaan anggaran atau kualitas anggaran (Abdullah *et al.*, 2015). Semakin tinggi frekuensi penyampaian dokumen tagihan maka semakin tinggi juga tingkat penyerapannya. Hal tersebut memiliki pemikiran yang sejalan dengan penelitian (Yuliani, 2020) yang menyampaikan pelaksanaan anggaran berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran.

Persoalan klasik dalam pelaksanaan anggaran adalah rendahnya serapan anggaran dan terkonsentrasinya anggaran pada akhir tahun. Beberapa penelitian menyebutkan beberapa penyebab keterlambatan penyerapan anggaran adalah proses pertanggungjawaban kegiatan (Herriyanto, 2012), pengelola keuangan (Herriyanto, (2012), Elim *et al.*, (2018)), komitmen manajemen, dan lingkungan birokrasi (Elim *et al.*, 2018), selain perencanaan anggaran serta proses pengadaan barang dan jasa. Berdasar hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran yang dilaksanakan Unsoed selama tahun 2023 - 2024, keterlambatan penyerapan anggaran terbesar diakibatkan oleh keterlambatan eksekusi dan anggaran serta proses pertanggungjawaban atas program, kegiatan dan anggaran yang sudah direncanakan.

Pengelolaan keuangan negara merupakan bagian dari pelaksanaan pemerintahan negara. Pengelolaan Keuangan Negara adalah keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban. Prinsip pengelolaan keuangan negara yakni harus tertib, taat pada peraturan perundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan,



Seminar Nasional LPPM UNSOED 2025

"Pengembangan Sumberdaya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan"
8 Oktober 2025
Purwokerto

dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Asas umum pengelolaan keuangan negara adalah akuntabilitas dan transparansi. Prinsip tersebut diwujudkan dalam laporan keuangan yang mengikuti standar akuntansi pemerintah, dapat diakses serta terdapat mekanisme audit baik eksternal maupun internal. Sistem akuntansi pemerintah berfungsi sebagai alat utama dalam pengelolaan keuangan negara karena mencatat, mengelola, dan melaporkan seluruh transaksi keuangan pemerintah secara akuntabel, transparan, dan sesuai aturan yang berlaku. Menurut Fauziah (2018) standar akuntansi pemerintah berisi prinsip-prinsip akuntansi pemerintah yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.. Bahtiar A, *et al* (2002) mengungkapkan bahwa akuntansi pemerintahan memiliki 3 tujuan pokok yaitu pertanggungjawaban, manajerial dan pengawasan

Akuntansi Pemerintah adalah suatu aktivitas pemberian jasa untuk menyediakan informasi keuangan pemerintah berdasarkan proses pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran suatu transaksi keuangan pemerintah serta penafsiran atas informasi keuangan (Sadat, 2020). Dalam pelaksanaannya akuntansi pemerintah memiliki pedoman yang disebut standar akuntansi pemerintah. Tujuannya adalah untuk memastikan akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan negara. Dalam kegiatannya akuntansi memiliki 3 rangkaian kegiatan asas yaitu kegiatan mengumpulkan data, kegiatan pencatatan dan kegiatan memberikan informasi perdagangan kepada pihak-pihak yang bersangkutan (Weygandt *et al.*, 2016).

Pertanggungjawaban keuangan negara adalah kewajiban pemerintah untuk melaporkan pengelolaan keuangan negara, yang meliputi seluruh pendapatan dan belanja negara, agar dapat dipertanggungjawabkan secara transparan, efisien, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran adalah tahap yang sangat penting dalam perealisasi program dan kegiatan pemerintah yang telah disusun/dibuat. Prinsip dasar pertanggungjawaban keuangan negara adalah akuntabilitas berorientasi pada hasil dan profesionalitas serta fokus pada hasil yang akan dicapai (UU Nomor 17 Tahun 2003). Hal ini sejalan prinsip Good University Governance (GUG) yang meliputi transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, kewajaran/keadilan, partisipasi, dan efektivitas serta efisiensi (Wijatno, 2009).

Universitas Jenderal Soedirman sejak tanggal 17 Desember 2009 melalui Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 502/KMK/2009 telah ditetapkan sebagai satuan kerja di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (PKBLU). Konsekuensinya adalah harus memiliki sistem akuntansi tersendiri. Pada ahun 2018 disusun Peraturan Rektor Nomor 35 Tahun 2018 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum Universitas Jenderal Soedirman. Peraturan Rektor ini disusun sebagai petunjuk teknis atas pelaksanaan ketentuan Pasal 3 ayat 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 220/PMK.05/2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 42/PMK.05/2016 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum. Pengelolaan keuangan di Unsoed terdiri atas mekanisme sistem kas kecil, sub sistem penggantian biaya (reimbursement), sub sistem transfer dana elektronik, dan sub sistem uang muka kegiatan.

Untuk menjamin akuntabilitas pengelolaan keuangan di Unsoed,, maka pejabat pengelola keuangan di Unsoed terdiri atas 2 unsur, yakni unsur pejabat keuangan dan pejabat teknis. Unsur pejabat keuangan terdiri atas otorisator perbendaharaan (OP), bendahara penerimaan



Seminar Nasional LPPM UNSOED 2025

"Pengembangan Sumberdaya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan"

8 Oktober 2025

Purwokerto

(BPI), bendahara pengeluaran (BPE), dan penguji tagihan (PT), sedangkan unsur pejabat teknis adalah otorisator kegiatan dan anggaran (OKA), dan penguji tagihan unit (PTU). Pejabat teknis dibantu oleh bendahara unit BLU (BUB), dan pelaksana teknis kegiatan (PTK). Kedua unsur pejabat pengelola keuangan tersebut, juga merupakan tahapan-tahapan yang harus dilewati untuk proses pertanggungjawaban belanja. Panjangnya tahapan proses pembayaran karena untuk menjamin akuntabilitas pengelolaan keuangan Unsoed, dan hal ini akan berpengaruh pada kecepatan serapan anggaran dan layanan keuangan.

Kualitas pelayanan publik merujuk pada tingkat pemenuhan harapan masyarakat terhadap produk dan jasa yang diberikan oleh pemerintah, yang diukur dari berbagai dimensi seperti keandalan, ketanggapan, jaminan, empati, dan bukti fisik. Untuk menjamin kualitas pelayanan, maka masing-masing perguruan tinggi menetapkan Standar Pelayanan Minimum (SPM). Standar pelayanan, sekurang-kurangnya memuat materi: 1. Prosedur pelayanan termasuk pengaduan. 2. Waktu penyelesaian. 3. Biaya Pelayanan. 4. Produk/hasil pelayanan. Pengukuran kualitas layanan menggunakan empat indikator tersebut dengan dua belas item pernyataan. Standar Pelayanan Minimum (SPM) Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor: 502/M/2022 tentang Standar Pelayanan Minimum Universitas Jenderal Soedirman,

METODE PENELITIAN

Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Menurut Sugiyono (2009) bahwa penelitian kualitatif bertujuan untuk mengungkapkan informasi kualitatif sehingga lebih berfokus pada proses dan makna suatu masalah. Pendekatan kualitatif dalam studi kasus ini memberikan fleksibilitas bagi peneliti untuk menggali lebih dalam pengalaman, persepsi, dan pandangan stakeholder terhadap pengelolaan keuangan. Dengan menggunakan studi kasus ini, peneliti akan menghubungkan fenomena yang ada di lapangan dengan konsep-konsep yang berkembang dari literatur dan data empirik (Herawati & Hastuti, 2023).

Penelitian dilaksanakan di Universitas Jenderal Soedirman. Penelitian dimulai bulan Mei sampai November 2025. Analisis data awal yang diperoleh dari responden menggunakan pengukuran tertentu dan divisualisasikan menggunakan grafik. Pengujian hipotesis dilakukan pendekatan *Structural Equation Model* (SEM) menggunakan Smart PLS

Berdasar hasil penelitian awal dilanjutkan dengan wawancara mendalam (*in-depth interviews*). Wawancara dilakukan kepada pejabat yang terlibat dalam pengelolaan keuangan di lapangan ini memungkinkan peneliti untuk memahami secara lebih rinci bagaimana kebijakan diterapkan dan bagaimana dinamika antarunit kerja berpengaruh pada efektivitas implementasi (Yin, 2009).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Deskriptif

Pengelolaan anggaran di Unsoed tersebar dalam 23 unit BLU (Unit Anggaran). Masing-masing unit BLU memiliki anggaran dan kontrak kinerja dengan rector. Besar anggaran tiap



Seminar Nasional LPPM UNSOED 2025

"Pengembangan Sumberdaya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan"

8 Oktober 2025

Purwokerto

unit berbeda-beda, tergantung tugas pokok dan fungsi Berdasar data transaksi non kas kecil, selama tahun 2023 – 2024 terdapat 24.613 transaksi. Sejumlah 73,69% dari jumlah transaksi terjadi pada semester 2 atau bulan Juli – Desember dan lebih dari 50,70% transaksi terjadi pada bulan Oktober – Desember serta 18,5% transaksi ditolak dan memerlukan revisi. Artinya pertanggungjawaban belanja sebagian besar dilakukan pada triwulan terakhir, dengan waktu efektif hanya 75 hari kalender.

Tabel 1. Jumlah Transaksi Non Kas Kecil per Bulan Tahun 2023 - 2024

Bulan	Tahun		Jumlah
	2023	2024	
Januari	20	24	44
Februari	214	133	347
Maret	442	268	710
April	339	747	1086
Mei	1425	1299	2724
Juni	841	723	1564
Juli	754	1042	1796
Agustus	705	1165	1870
September	981	1011	1992
Oktober	1273	1309	2582
November	2025	1636	3661
Desember	2398	3839	6237
Grand Total	11417	13196	24613

Tabel 2. Rata-rata Lama Waktu Penyelesaian Dokumen Pertanggungjawaban Keuangan per Tahapan per Unit

Uraian	X1	X2	X3	X4	X5	X6	Y
Rata - rata	34,90	22,95	56,67	13,22	22,37	24,32	196,09
Min	16,84	0,54	26,63	8,80	16,98	13,22	148,38
Max	56,71	63,22	92,10	17,81	28,06	30,55	276,92
Standar Deviasi	0,57	16,23	0,57	0,10	0,12	0,17	1,48

Keterangan:

X1 : Lama waktu_Pelaksana Teknis Kegiatan (PTK) ke Penguji Tagihan Unit BLU (PTU)

X2 : Lama waktu PTU – Otorisator Kegiatan dan Anggaran (OKA)

X3 : Lama waktu OKA – Staf Penguji Tagihan BLU (PT)

X4 : Lama waktu Staf PT – Penguji Tagihan BLU (PT)

X5 : Lama waktu PT – Otorisator Perbendaharaan BLU (OP)

X6 : Lama waktu OP – Bendahara Pengeluaran (BP)

Y : Lama waktu total sejak PTK hingga BP

Berdasar tabel 2 diketahui, rata-rata lama waktu penyelesaian dokumen tercepat pada tahapan



Seminar Nasional LPPM UNSOED 2025

"Pengembangan Sumberdaya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan"

8 Oktober 2025

Purwokerto

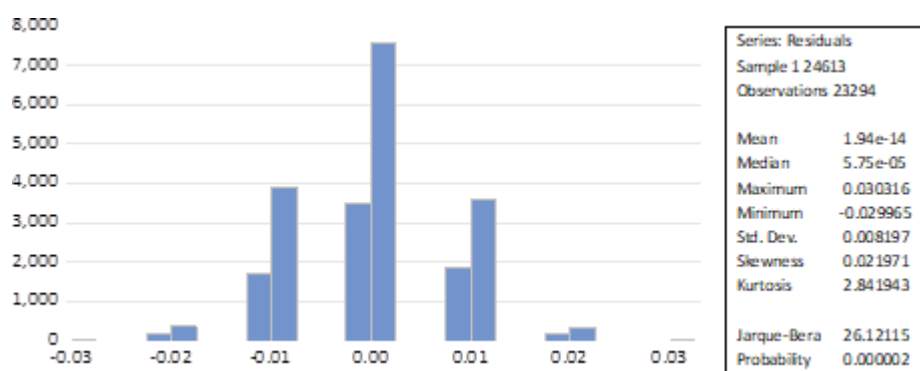
Staf PT ke PT (X₄) sebesar 13,22 jam atau 0,55 hari, sedangkan terlama ada di tahap OKA ke staf PT (X₃), yang mencapai 56,67 jam atau 2,36 hari. Berdasar hasil wawancara dengan pengelola keuangan di tingkat unit maupun universitas, lamanya waktu pada tahap ini, dikarenakan pada tahap ini merupakan entri point yang pertama sebelum verifikasi-verifikasi tahap berikutnya, sehingga pada tahap ini diperlukan ketelitian dan kecermatan yang lebih tinggi, agar diperoleh dokumen yang akuntabel.

Rata-rata lama waktu penyelesaian layanan keuangan sejak PTK hingga BP sebesar 196,09 jam atau 8,17 hari. Lama waktu penyelesaian pertanggungjawaban keuangan tersebut masih diatas standar pelayanan minimum yang ditetapkan 5 hari (Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia No. 502/M/2022).

B. Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji normalitas adalah prosedur statistik untuk menentukan apakah residual atau variabel data mengikuti distribusi normal. Hasil Uji Normalitas tersaji dalam Gambar 1.



Gambar 1. Hasil Uji Normalitas Data

Berdasar gambar 1, terlihat nilai skewness sebesar 0,02197 dan nilai kurtosis sebesar 2,8419. Berdasarkan nilai skewness ($0,02197 < +1$) dan kurtosis (2,8419) termasuk Platikurtik, hasil ini menunjukkan bahwa data residual memiliki distribusi mendekati normal. Namun, berdasarkan uji Jarque-Bera dengan nilai probabilitas sebesar 0,000002 ($< 0,05$), maka secara statistik data tidak berdistribusi normal sempurna (Ghozali, 2016).

2. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan mengidentifikasi apakah terdapat korelasi tinggi antar variabel bebas dalam model regresi (Suliyanto, 2011). Indikator utama adalah nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) dan nilai tolerance. Hasil Uji Multikolinieritas terlihat dalam tabel 3



Seminar Nasional LPPM UNSOED 2025

"Pengembangan Sumberdaya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan"

8 Oktober 2025

Purwokerto

Tabel 3. Hasil Uji Multikolinieritas

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	1.52E-08	5.271306	NA
X1_DURASI_PTK_PTU	3.75E-12	3.545001	1.236
X2_DURASI_PTU_OKA	1.74E-12	2.649922	1.356
X3_DURASI_OKA_STAF PT	9.41E-13	2.372155	1.011
X4_DURASI_STAF PT_PT	5.50E-12	1.496635	1.014
X5_DURASI_PT_OP	2.79E-12	1.623104	1.015
X6_DURASI_OP_BP	4.05E-12	1.990299	1.036

Dari tabel 3 diketahui bahwa semua variable X memiliki nilai VIF kurang dari 5 ($VIF < 5$), dan nilai toleransi seluruh variabel independen lebih besar dari 0,10. Berdasarkan hasil ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas antar variabel dalam model regresi.

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan mendeteksi ketidaksamaan varians residual di sepanjang rentang nilai variabel independen dalam model regresi. Pengujian ini penting untuk memastikan asumsi klasik regresi terpenuhi, karena ketidaksesuaian varian dapat membuat hasil regresi tidak valid dan menyesatkan (Ghozali, 2018).

Berdasarkan hasil uji White, diketahui bahwa seluruh nilai probabilitas lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05, yaitu Prob. F-statistic sebesar 0,1011, Prob. Chi-Square ($Obs \cdot R^2$) sebesar 0,1012, dan Prob. Scaled Explained SS sebesar 0,1842. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat heteroskedastisitas dalam model regresi ini.

C. Analisis Regresi Berganda

1. Persamaan Regresi

Model regresi berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda diperoleh nilai koefisien regresi yang disajikan dalam tabel 4.

Tabel 4. Hasil Uji Hipotesis (Uji t)

Variabel	Koefisien yang tidak distandardisasi	Koefisien standarisa si	SE	Nilai T (T value)	Nilai P (P value)	2.5 %	97.5 %
Durasi_PTK - PTU (X_1)	0.324	0.164	0.009	34.725	0.000	0.305	0.342
Durasi_PTU - OKA (X_2)	0.807	0.362	0.011	73.163	0.000	0.785	0.829
Durasi_OKA - Staf PT (X_3)	0.871	0.428	0.009	100.246	0.000	0.853	0.888
Durasi_Staf PT - PT (X_4)	0.643	0.105	0.026	24.571	0.000	0.592	0.694
Durasi_PT - OP (X_5)	0.937	0.238	0.017	55.582	0.000	0.904	0.971
Durasi_OP - BP (X_6)	1.052	0.233	0.020	53.892	0.000	1.014	1.090
Intercept	42.329	0.000	1.025	41.296	0.000	40.320	44.338

Berdasarkan hasil koefisien regresi pada tabel 4, diperoleh persamaan regresi sebagai berikut.



Seminar Nasional LPPM UNSOED 2025

"Pengembangan Sumberdaya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan"

8 Oktober 2025

Purwokerto

Serapan Anggaran = $0,324X_1 + 0,807X_2 + 0,871X_3 + 0,643X_4 + 0,937X_5 + 1,052X_6 + 42,329$

Semua variable X memiliki P Value $< 0,05$. Artinya, Variabel-variabel tersebut secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variable Y.

2. Uji Koefisien Determinasi

Uji koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa baik model regresi mampu menjelaskan variasi variabel dependen oleh variabel independen. Koefisien determinasi, atau disebut R^2 , menunjukkan proporsi variabilitas data yang bisa dijelaskan oleh model (Sugiyono, 2016). Hasil Uji Koefisien Determinasi terlihat dalam tabel 5.

Tabel 5. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

	Durasi PTK - BP (Y)
R-square	0.557
Adjusted R-square	0.557
Uji Durbin-Watson	1.597

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi (R^2), besarnya adjusted R^2 square sebesar 0,557. Hal ini berarti kemampuan Pelaksana Teknis Kegiatan (PTK), Penguji Tagihan Unit (PTU), Otorisator Kegiatan dan Anggaran (OKA), Staf Penguji Tagihan BLU, Penguji Tagihan BLU, Otorisator Perbendaharaan BLU dan Bendahara Pengeluaran (BP) dalam menjelaskan lama waktu serapan anggaran hanya sebesar 55,7%, masih terdapat 44,3% faktor lain di luar model penelitian. Berdasar hasil wawancara dengan pengelola keuangan, disebutkan bahwa akurasi dokumen pertanggungjawaban keuangan, kelengkapan dokumen, kompetensi sumber daya manusia dan komitmen sumberdaya manusia pengelola keuangan, sangat berpengaruh pada kecepatan layanan keuangan di Unsoed.

3. Uji Kelayakan Model (Uji F)

Uji kelayakan model dilakukan untuk menilai model regresi yang dihasilkan layak digunakan untuk menganalisis data dan dapat diterima secara statistik. Hasil Uji Kelayakan Model terlihat dalam tabel 6,

Tabel 6. Hasil Uji Kelayakan Model (Uji F)

	Jumlah kuadrat	df	Rata-rata kuadrat	F	Nilai P (P value)
Total	252801905.716	24614	0.000	0.000	0.000
Kesalahan	112065026.325	24607	4554.193	0.000	0.000
Regresi	140736879.391	7	20105268.484	4414.672	0.000

Dari Tabel 6, diketahui model regresi menghasilkan nilai P value $< 0,05$. Hal ini berarti semua variabel independen (X) secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen (Y). Nilai signifikansi uji F juga menunjukkan lebih kecil dari 0,05, sehingga model dianggap layak (fit) dan dapat digunakan untuk memprediksi variabel dependen berdasarkan variabel independen



Seminar Nasional LPPM UNSOED 2025

"Pengembangan Sumberdaya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan"

8 Oktober 2025

Purwokerto

4. Uji Hipotesis (Uji T)

Uji Hipotesis (Uji t) digunakan untuk menguji pengaruh masing-masing variabel bebas (independen) secara parsial terhadap variabel terikat (dependen) dalam analisis regresi linier berganda. Uji t juga digunakan untuk mengetahui koefisien regresi variabel independen berbeda secara signifikan dari nol, artinya variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Berdasar hasil Uji t yang tersaji pada Tabel 6, diketahui bahwa nilai signifikansi (p-value) dari uji t lebih kecil dari 0,05, maka koefisien regresi variabel tersebut dianggap signifikan, yang berarti variabel bebas (X) tersebut memiliki pengaruh yang nyata terhadap variabel terikat (Y).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa:

1. Variabel Staf Penguji Tagihan dan Otorisator Kegiatan dan Anggaran (OKA) merupakan variabel yang dominan berpengaruh terhadap kecepatan serapan anggaran dan layanan keuangan pada Sistem Akuntansi Unsoed.
2. Pengaruh variabel X terhadap variabel Y secara simultan sebesar 55,7%, masih ada variabel lain diluar variabel penelitian yang berpengaruh sebesar 44,3%
3. Kecepatan layanan keuangan di Unsoed memenuhi persamaan $Y = 0,324X_1 + 0,807X_2 + 0,871X_3 + 0,643X_4 + 0,937X_5 + 1,052X_6 + 42,329$
4. Lama waktu layanan keuangan rata-rata 196,09 jam atau 8,17 hari (diatas SPM Unsoed Bidang Keuangan)

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Universitas Jenderal Soedirman atas pembiayaan penelitian ini melalui Hibah Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2025, Skema Riset Non Dosen

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, S., dan R. Nazry. 2014. *Varian Anggaran Pendapatan dan Varian Belanja Daerah: Sebuah Pengantar*.
- Arif, B., Muchlis, dan Iskandar. 2009. *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: @kademia.
- Bastian, I. 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Erlangga.
- Elim, M.A., D.S. Ndaparoka, dan T.E. Tomasowa. 2018. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Belanja pada Organisasi Perangkat Daerah di Kota Kupang. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, dan Audit* 3: 46–56.
- Fauziah, I. 2018. *Standar Akuntansi Pemerintahan Sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ghozali, I. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Edisi 9. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, A., dan M.S. Kusufi. 2016. *Akuntansi Sektor Publik: Dari Anggaran hingga Laporan Keuangan, dari Pemerintah hingga Tempat Ibadah*. Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat.
- Herriyanto. 2012. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keterlambatan Penyerapan Anggaran Belanja pada Satuan Kerja Kementerian/Lembaga di Wilayah Jakarta*. Tesis. Jakarta:



Seminar Nasional LPPM UNSOED 2025

"Pengembangan Sumberdaya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan"

8 Oktober 2025

Purwokerto

- Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- PPM School. 2023. Akuntansi Pemerintah: Tujuan, Prinsip dan Contoh.
- Sadat, A. 2020. *Governmental Accounting (Akuntansi Pemerintahan)*. Yogyakarta: Deepublish.
- Setiyono, N. 2016. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Belanja (Studi pada Satuan Kerja Kementerian/Lembaga di Lingkup Pembayaran KPPN Bojonegoro). Tesis. Malang: Universitas Brawijaya.
- Steccolini, I. 2004. Is the Annual Report an Accountability Medium? An Empirical Investigation into Italian Local Governments. *Financial Accountability & Management* 20(3): 327–350.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Weygandt, J.J., P.D. Kimmel, dan D.E. Kieso. 2018. *Accounting Principles*. 13th Edition. Hoboken: John Wiley & Sons, Inc.
- Wibowo dan Aisjah. 2019. Analisis Variabel yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran (Studi pada Satuan Kerja di Wilayah Pembayaran Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Malang). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB UB* 6(2).
- Wijatno, S. 2009. *Pengelolaan Perguruan Tinggi Secara Efisien, Efektif, dan Ekonomis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Yin, R.K. 2009. *Case Study Research: Design and Methods*. 4th Edition. SAGE Publications.
- Yuliani. 2020. Pengaruh Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Penyerapan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Triwulan IV Tahun 2019 pada UPTD Puskesmas di Kabupaten Tegal. Skripsi. Tegal: Universitas Pancasakti Tegal.
- Zulaikah, B., dan D.I. Burhany. 2019. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penumpukan Penyerapan Anggaran pada Triwulan IV di Kota Cimahi. *Prosiding Industrial Research Workshop and National Seminar* 10(1): 1221–1234.